

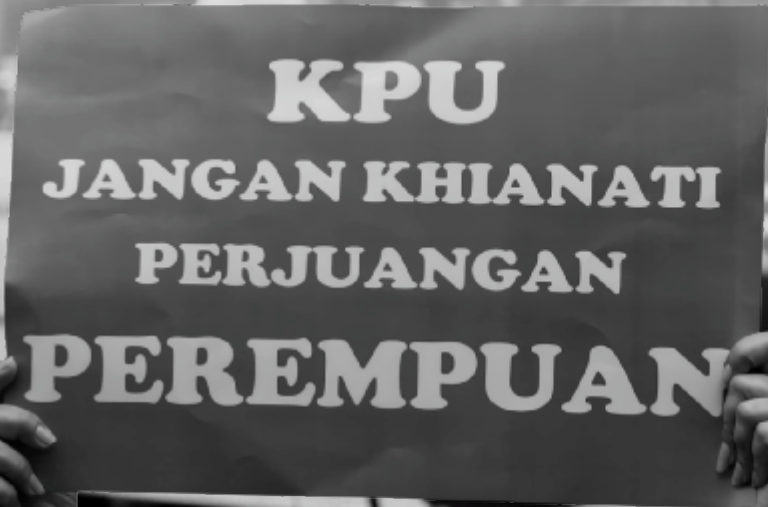


SAAT KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PEMILU **2024** 'TERSAYAT'

**Government
(Hal.2)**
Demi Bansos,
Menkeu Ungkap Ada
Pemda Manipulasi
Data Kemiskinan

Aturan terbaru Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif bak menyayat prinsip keadilan. Pasalnya, dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 hanya membuka ruang jumlah caleg perempuan di sejumlah daerah pemilihan menjadi 'tereliminasi' sehingga kurang dari 30%. Padahal, selama 20 tahun terakhir, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dalam Pasal 8 disebutkan diberlakukan pembulatan ke bawah apabila perhitungan 30% keterwakilan perempuan dari total bakal caleg yang dibutuhkan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah pemilihan dibutuhkan delapan bakal caleg, maka 30% keterwakilan perempuan semestinya adalah 2,4 orang. Namun karena angka desimalnya kurang dari koma lima, maka di dapil tersebut ada 2 bakal caleg perempuan untuk memenuhi syarat. Usai dikritik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membentuk forum tripartit bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

(Baca Hal 11)



(Ilustrasi) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 membuat jumlah caleg perempuan di sejumlah daerah pemilihan menjadi 'tereliminasi' sehingga kurang dari 30%. (dok)



| DAERAH PEMILIHAN | JUMLAH KURSI PER-DAPIL | 30% | PEREMPUAN | PERSENTASE |
|--------------------|------------------------|-----|-----------|------------|
| Aceh 1 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Sumbar 1 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Riau 1 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Jambi | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Sumsel 1 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Bengkulu | 4 | 1.2 | 1 | 25.0% |
| Kep.riau | 4 | 1.2 | 1 | 25.0% |
| DKI Jakarta 2 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| DKI Jakarta 3 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Jawa Barat 1 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Jawa Barat 9 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Jawa Barat 10 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Jawa Tengah 1 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Jawa Tengah 2 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Jawa Tengah 4 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Jawa Tengah 5 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Jawa Tengah 6 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Jawa Tengah 7 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Jawa Tengah 8 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Jawa Tengah 9 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Jawa Tengah 10 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Jawa Timur 2 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Jawa Timur 3 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Jawa Timur 4 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Jawa Timur 5 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Jawa Timur 7 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| DI Yogyakarta | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| NTB 2 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| NTT 2 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Kalimantan Barat 1 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Kalimantan Barat 2 | 4 | 1.2 | 1 | 25.0% |
| Kalimantan Timur | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Sulawesi Tengah | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Sulawesi Selatan 1 | 8 | 2.4 | 2 | 25.0% |
| Sulawesi Selatan 3 | 7 | 2.1 | 2 | 28.6% |
| Sulawesi Barat | 4 | 1.2 | 1 | 25.0% |
| Maluku | 4 | 1.2 | 1 | 25.0% |

SIMULASI PEMBULATAN KE BAWAH SESUAI PERATURAN KPU NO 10 TAHUN 2023

Demi Bansos, Menkeu Ungkap Ada Pemda Manipulasi Data Kemiskinan

JAKARTA- Oknum pemerintahan daerah diduga melakukan manipulasi data masyarakat miskin. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan sulitnya mengelola data soal penerima bantuan sosial (bansos) di daerah-daerah.

Sri Mulyani mengatakan ada oknum pimpinan di daerah memasukkan masyarakat ke dalam kategori miskin, namun bukan karena benar-benar miskin, tapi karena telah berjasa dalam memberikan suara di pemilihan.

"Ada masalah tata kelola di mana pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin," kata Sri Mulyani dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

"Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar, atau bahkan yang terburuknya mereka adalah yang menjadi tim suksesnya didaftarkan," tambahnya.

Sri Mulyani menganggap hal ini merupakan konsekuensi dari sistem politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi bebas. Selain itu juga ada mekanisme desentralisasi supaya Pemda dapat mandiri mengelola masyarakatnya.

"Ini tantangan kompleks saat kita membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya," tutur dia.

Sri Mulyani menilai yang bisa dilakukan saat ini memulai perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kementerian Keuangan bersama Bappenas telah mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

"Ini pengumpulan data yang menyeluruh oleh BPS yang diharapkan akan selesai pertengahan tahun ini. Bahkan untuk memulai pengumpulan data ini, butuh dua tahun bagi kita untuk meyakinkan kementerian lain karena data sekarang sangat powerful," ungkap Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu bercerita butuh usaha keras saat ingin memulai pendataan secara menyeluruh dan terpusat. Peralannya, masih ada menteri-menteri yang menginginkan data-data itu hanya di bawah kementerian atau lembaganya.

"Beberapa kementerian menginginkan data hanya berada di bawah mereka. Data-data ini memang berasal dari masing-masing kementerian, tapi ini sangat penting bagaimana kita mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan

didasarkan pada konsumsi di Indonesia," tegas Sri Mulyani.

Bank Dunia: Miskin Ekstrem RI Tersisa 1,5%

Bank Dunia (World Bank) menyebut Indonesia berhasil meraih capaian yang berkesan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia turun dari 19% pada 2002 menjadi 1,5% pada 2022.

Demikian berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk 'Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security'. Kemiskinan ekstrem itu diukur melalui paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) yang didefinisikan sebagai hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 1,90 per hari.

"Kemiskinan ekstrem yang diukur berdasarkan PPP pada tahun 2011 sebesar US\$ 1,9, turun dari 19% pada 2002 menjadi 1,5% pada 2022," tulis Bank Dunia dalam laporannya, Selasa (9/5/2023).

Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 1,5% pada 2022 disebut berkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dukungan fiskal pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan.

"Indonesia kini dapat memfokuskan berbagai upayanya untuk meningkatkan taraf hidup lebih banyak penduduknya, termasuk rumah tangga yang rentan dengan menciptakan peluang yang lebih baik," ucapnya.

Penerapan kebijakan fiskal pemerintah disebut telah berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan sekitar tiga poin koefisien gini. Akan tetapi, investasi yang berpihak kepada rakyat miskin dinilai masih terbatas.

"Indonesia perlu meningkatkan perlindungan sosialnya, termasuk di dalamnya bantuan sosial dan asuransi, serta inklusi finansial seraya melakukan investasi berketahanan pada infrastruktur untuk memitigasi dampak guncangan di masa mendatang," tutur Country Director World Bank Indonesia, Satu Kahkonen.

Bank Dunia juga menyebut bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ketimbang subsidi energi yang dinilai tidak efektif dan lebih mahal.

"Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga sangat progresif dalam mengurangi ketimpangan," tulis laporan itu.

Selain bansos, jaminan sosial dinilai dapat mengurangi dampak guncangan pengangguran dan kesehatan. Sayangnya di Indonesia hal itu lebih banyak tersedia bagi pekerja formal saja. "Diperlukan adanya sistem



(Ilustrasi) Kaum pekerja berdesakan di kereta setiap berangkat dan pulang dari kantor. (dok)

bantuan sosial yang lebih responsif dan perluasan cakupan jaminan sosial, termasuk bagi pekerja informal," ucapnya.

Menurut laporan Bank Dunia, program subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan serta ketimpangan, justru membebani keuangan Indonesia. "Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," ucapnya.

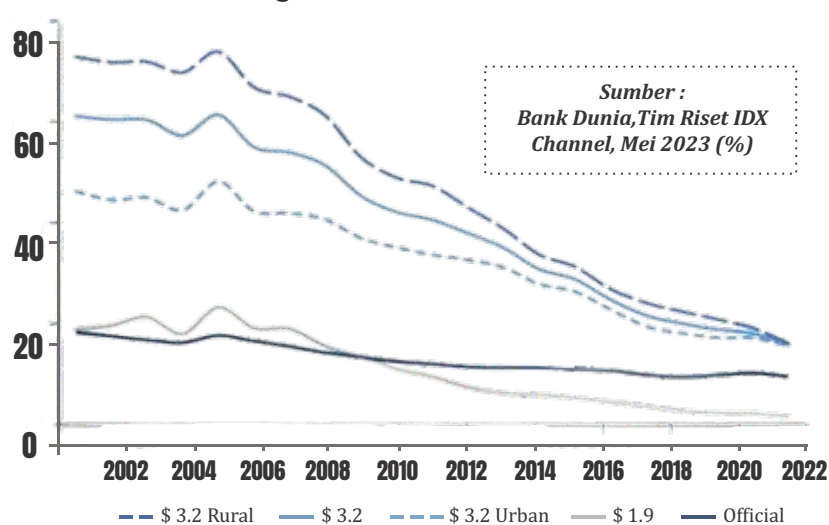
Bank Dunia mengungkapkan implementasi bantuan subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran di lapangan. Artinya, hanya sedikit masyarakat miskin yang menerima bantuan program tersebut. "Subsidi tersebut hanya mengurangi kemiskinan sebesar 2,4 poin persentase. Sebagian besar subsidi BBM tidak

tepat sasaran dan bahkan dapat bersifat regresif, tetapi berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi," imbuhnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia 0% pada 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis target tersebut bisa menjadi nyata. "Misi mengentaskan kemiskinan tentu memiliki tantangan tersendiri seperti ketimpangan antarwilayah, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, efektivitas program, dan sinergi pemerintah pusat-daerah menjadi sesuatu yang harus konsisten kita perbaiki," ucap Sri Mulyani. "Kita optimistis target pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa menjadi nyata," tambahnya. (wid,rls,dtc,ist/dya)

KEMISKINAN RI TURUN DRASTIS (2002-2022)

Berdasarkan ukuran garis kemiskinan Internasional Absolut



Ketua DPR RI Pimpin AIPA di KTT ASEAN Susun Draf Pesan soal Pekerja Migran hingga Ketegangan Geopolitik



Puan Maharani Ketua DPR RI saat memimpin pertemuan persiapan atau Preparatory Meeting bersama perwakilan parlemen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Foto: Istimewa

LABUAN BAJO- Ketua DPR RI sekaligus Presiden Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA) Puan Maharani memimpin pertemuan persiapan di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5/2023). Pertemuan persiapan dilakukan untuk menyusun naskah pesan yang akan disampaikan dalam Pertemuan Tatap Muka Pemimpin AIPA-ASEAN pada Rabu (10/5/2023) hari ini.

"Hari ini dan besok insyaallah kita akan mengadakan persiapan untuk bisa nantinya besok menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh AIPA di depan pemimpin negara-negara yang akan di-host oleh Presiden Joko Widodo," kata Puan kepada awak media selepas pertemuan di Labuan Bajo.

Dengan persiapan tersebut, Puan berharap AIPA dapat menyampaikan isu-isu terkait ASEAN sembari menjalin kerja sama erat dengan para pemimpin negara ASEAN dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta mencari solusi-solusi yang diinginkan.

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa Pertemuan Tatap Muka Pemimpin ASEAN-AIPA merupakan forum penting sebagai wadah dialog dan kerja sama antara para pemimpin negara dan parlemen ASEAN yang tergabung dalam AIPA. "ASEAN-AIPA Leaders Interface merupakan platform penting untuk dialog dan konsultasi antara para Pemimpin ASEAN dan AIPA," katanya.

Beberapa isu yang menurut Puan dapat dibicarakan dalam Pertemuan Tatap Muka Pemimpin ASEAN-AIPA adalah rencana Pemerintah Indonesia mendorong isu perlindungan pekerja migran serta kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.

Puan juga menyoroti situasi

ketegangan geopolitik dan persaingan kekuatan besar yang memengaruhi ASEAN, termasuk potensi konflik di Laut China Selatan, apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, Puan turut mengingatkan bahwa negara-negara kawasan Asia Tenggara juga dihadapkan dengan ancaman cuaca ekstrem serta dampak pemanasan global.

Oleh karena itu, Puan meyakini parlemen negara-negara ASEAN yang tergabung dalam AIPA harus terus berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi tantangan global yang kompleks, mengingat lembaga eksekutif tidak akan mampu melakukan penyelesaian masalah sendirian.

"Di kawasan ini, kita perlu mendukung berbagai instrumen ASEAN untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran di Asia Tenggara. Saya percaya bahwa dialog di antara parlemen dari berbagai negara di kawasan akan membantu kepercayaan di antara negara-negara besar," ujarnya.

Pertemuan persiapan AIPA diikuti perwakilan seluruh parlemen se-Asia Tenggara, termasuk Ketua DPR Vietnam Nguyen Duc Hai, Ketua DPR Laos Sounthone Xayachack, perwakilan parlemen Malaysia Dato Johari bin Abdul, dan perwakilan parlemen Singapura Desmond Choo. Sementara itu, Parlemen Thailand diwakili oleh Singsuk Singpai yang merupakan Wakil Pertama Ketua Majelis Tinggi Thailand.

Dibayangi Konflik Myanmar

Negara-negara Asia Tenggara dinilai tengah berada di persimpangan jalan. Pasalnya, meningkatnya kekerasan di Myanmar yang dikuasai junta dan tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan menjadi tema yang membayangi Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa

Asia Tenggara (KTT ASEAN). ASEAN telah lama dikecam oleh para kritikus sebagai macan ompong karena tidak mengambil tindakan lebih keras untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar.

Prinsip untuk tidak saling ikut campur dalam urusan dalam negeri ini muncul saat ASEAN didirikan tahun 1967 di era Perang Dingin. ASEAN berjuang agar tidak terjatuh dalam persaingan Blok Barat maupun Timur. Namun situasi geopolitik saat ini telah jauh berubah.

Preferensi keanggotaan ASEAN kini pun beragam. Kamboja, Laos, dan Myanmar secara geopolitik membangun hubungan erat dengan Beijing, sementara Filipina adalah sekutu erat Washington di Asia dan baru-baru ini mengizinkan perluasan kehadiran militer Amerika di negaranya. Negara lainnya seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam sama-sama berhubungan erat dengan Cina dan AS.

"ASEAN ingin tetap terbuka, bekerja sama dengan siapa saja," kata Presiden Indonesia Joko Widodo, sebagai ketua ASEAN tahun ini. "Kami juga tidak ingin ASEAN menjadi proxy siapa pun," ujarnya.

Myanmar dilanda kekerasan sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 2021. Lebih dari 3.450 warga sipil tewas sejak peristiwa kudeta tersebut, ribuan lainnya masih dipenjar, menurut data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang menghitung jumlah korban dan penangkapan terkait dengan represi oleh pemerintah militer.

Serangan udara di sebuah desa di kubu pemberontak bulan lalu yang dilaporkan menewaskan sekitar 170 orang memicu kecaman global. Serangan ini juga memicu seruan agar ASEAN mengambil tindakan lebih keras untuk mengakhiri kekerasan, termasuk seruan dari Perserikatan

Bangsa-Bangsa.

ASEAN sempat memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis tersebut. Namun upaya ini tidak berhasil, karena junta mengabaikan kritik internasional dan menolak untuk melangsungkan dialog dengan lawan politiknya.

"ASEAN berada di persimpangan jalan," Mahfud MD, menteri koordinator politik, hukum dan keamanan Indonesia, memperingatkan Selasa pada hari pertama KTT. "Krisis demi krisis tengah menguji kekuatan kita sebagai komunitas. Dan kegagalan untuk mengatasinya akan berisiko membahayakan relevansi kita," ujar Mahfud MD dalam sambutannya, Myanmar termasuk di antara keadaan darurat yang dihadapi blok tersebut.

Di bawah tekanan internasional untuk berbuat lebih banyak guna mengatasi kekerasan, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang jenderal tertinggi Myanmar ke KTT, dan hanya mengizinkan kehadiran perwakilan nonpolitik. Penguasa pimpinan militer Myanmar memprotes tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebijakan non-interferensi. "Singkatnya, organisasi ini sekarang sedang menghadapi krisis eksistensial," kata Richard Heydarian, dosen hubungan internasional di Universitas Filipina yang dikelola pemerintah.

Sebelumnya pekan lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia menggunakan "diplomasi senyap" untuk berbicara dengan semua pihak yang terlibat konflik Myanmar dan memacu upaya tercapainya perdamaian. (wid, AP, AFP, rtr;ist/dya)

4 ISU AKAN DIBAHAS DALAM PERTEMUAN KTT ASEAN

- Berkaitan dengan tema keketuaan RI di ASEAN tahun ini — yaitu, ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Adapun pembahasan tersebut juga berkaitan pula dengan pembangunan dan penguatan kelembagaan komunitas ASEAN di kawasan Asia Tenggara.
- Perihal Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama antar sesama negara anggota ASEAN atau biasa disebut dengan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Para kepala negara nantinya akan membahas soal perkembangan terkini mengenai akses TAC yang telah dibentuk pada 1976. Roadmap keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN juga akan dibahas dalam rangka TAC.
- Para kepala negara ASEAN akan meringkas diskusi mengenai implementasi 5 Point Consensus oleh junta militer Myanmar. Sebab, sejak resolusi atas krisis kemanusiaan dan politik di Myanmar tersebut dibentuk oleh ASEAN di Jakarta pada 2022, sejauh ini belum ada inisiatif atau tindakan nyata dari pemerintah junta untuk mengimplementasikannya.
- Implementasi nyata dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Resolusi ini merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk menetralkan tajarnya rivalitas negara-negara tetangga di kawasan Asia-Pasifik yang dapat mengancam stabilitas serta keamanan regional.

Diduga Dianiaya Rekan Satu Sel, Tahanan Polres Tanjung Perak Meninggal



Sitiyah istri narapidana narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang meninggal dunia se usai membuat laporan ke Bid Propam Polda Jatim. Foto: Luhur for JPNN

SURABAYA - Seorang tahanan narkoba Polres Tanjung Perak Surabaya meninggal dunia diduga akibat penganiayaan. Tahanan yang diketahui bernama Abdul Kadir, warga Kapas Madya II, Kenjeran, Surabaya ini meninggal pada Jumat (28/4/2023) lalu. Namun, kasus ini baru mencuat dan Polda Jatim telah menetapkan beberapa tersangka serta empat orang anggota polisi yang diduga lalai.

Abdul Kadir merupakan tahanan narkoba yang ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Jumat (03/02/2023) lalu.

Terbongkarnya kasus ini bermula ketika Sitiyah, istri Abdul Kadir, yang merasa curiga dengan penyebab kematian suaminya. Dia menceritakan bahwa ketika itu menerima informasi jika suaminya sempat kritis karena sesak napas pukul 07.00 WIB. Namun, 30 menit kemudian ia dikabari jika suaminya telah meninggal dunia di RS PHC.

Sitiyah merasa curiga dengan laporan kondisi suaminya, sebab selama ini suaminya tidak pernah memiliki riwayat sakit pernafasan. "Saya merasa janggal dengan alasan polisi yang menyebut meninggal karena sesak napas. Akhirnya pas di rumah keluarga membuka kain kafan dan mendapati ada luka lebam," ujar Sitiyah, dikutip dari beritajatim.com, Selasa (9/5/2023).

Sitiyah mengaku, saat itu melihat ada dua luka di kepala, bahkan luka tersebut masih mengeluarkan darah segar. Selain itu juga ada tiga luka di belakang leher berbatasan dengan kepala dan sejumlah luka di bagian tangan dan badan.

"Saya menduga suami saya dianiaya sebelum meninggal. Karena suami saya tidak punya riwayat sakit asma dan ada luka baru," imbuh

Sitiyah.

Sitiyah berharap semua oknum anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus penganiayaan suaminya itu, ditetapkan sebagai tersangka.

Ia juga berharap, pihak Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Herlina untuk segera dicopot dari jabatannya karena terbukti bahwa sejumlah oknum anak buahnya terlibat dalam kasus tewasnya sang suami.

"Sesuai yang ditetapkan, iya dipecat. Semua anggotanya yang melakukan, kapolres yang terlibat. Kapolresnya dicopot. Karena dia yang tanggung jawab kan, nyawa suami saya," ujar ibu dua anak itu, di depan Gedung Bidang Propam Mapolda Jatim.

Sementara itu, Kuasa Hukum keluarga Kadir, Taufik mengatakan atas temuan tersebut pihaknya langsung melaporkan ke Bidpropam Polda Jawa Timur. Sebab ia menduga kematian Kadir ini janggal dan dugaan terjadi pelanggaran etik dalam kasus kematian Kadir. Selain itu, ia juga melaporkan ke SPKT Polda Jatim terkait dugaan tindakan pidana umum penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang.

"Tadi sudah bertemu dengan bidpropam dan diterima laporannya. Saat ini kami masih melaporkan ke SPKT. Nanti saya kabari ya," tegas Taufik.

Sementara Kabid Propam Polda Jawa Timur, Kombes Pol Iman Setiawan mengatakan pihaknya telah menerima laporan. "Kami intinya menerima segala bentuk laporan dan pengaduan dari masyarakat. Selanjutnya informasi diupdate satu pintu melalui bidang humas Polda Jatim," tegasnya.

Kasus tersebut langsung ditangani

Ditreskrim Polda Jatim. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, akhirnya menetapkan 13 tersangka atas kasus meninggalnya Kadir. Ke-13 tersangka ini merukan pada tahanan yang diduga telah menganiaya Kadir. Para tahanan tersebut diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Kadir hingga tewas.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan penyebab tewasnya korban setelah dianiaya oleh 13 orang sesama tahanan di dalam Ruang Tahanan Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

"Setelah hasil pemeriksaan sementara tim Reskrim Polda Jatim dan Propam Polda Jatim, didapatkan sementara ini ada 13 tersangka sipil. Ini para tahanan yang ada di sana (Perak). Melakukan tindak kekerasan terhadap korban," ujarnya, Selasa (9/5/2023).

Selain itu, Bidang Propam Polda Jatim juga menetapkan seorang perwira yang menjabat sebagai Kasat Tahti Polres Tanjung Perak Surabaya, beserta tiga orang bintang anggotanya sebagai terduga pelanggar kode etik disiplin Polri, atas kasus meninggalnya seorang tahanan.

Mereka ditetapkan sebagai terduga pelanggar kode etik Polri, karena insiden penganiayaan tersebut berlokasi di ruang tahanan yang menjadi tanggung jawab keempat anggota tersebut. Keempat orang oknum anggota kepolisian tersebut ditengarai lalai dalam menjalankan tugasnya.

Sehingga tidak dapat mengantisipasi adanya keributan yang berujung pada penganiayaan korban di dalam area tahanan Mapolres Tanjung Perak Surabaya. Hingga korban tewas dengan mendera sejumlah luka.

"Jadi 4 anggota ini yang jelas tidak melakukan tugas pokok sesuai kewenangannya. Tiga bintang ini kan sebagai penjaga tahanan yang harusnya melakukan pemeriksaan, melakukan pengawasan terhadap tahanan. Yang satu Kasat Tahti yang seharusnya memimpin pelaksanaan pengawasan atau penjagaan tahanan," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, Selasa (9/5/2023).

Hingga saat ini, lanjut Dirmanto, keempat oknum anggota tersebut sedang menjalani serangkaian pemeriksaan internal yang dilakukan oleh anggota Bidang Propam Polda Jatim. "Masih diperiksa," ungkap mantan Kapolsek Wonokromo Polrestabes Surabaya itu.

Disinggung mengenai adanya dugaan keterlibatan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Herlina, dalam kasus tersebut, Dirmanto enggan menjawabnya, dan meminta awak media menanti perkembangan proses penyelidikan yang masih terus bergulir beberapa waktu ke depan. "Ditunggu saja," jelasnya. (lut/dya)



Taufik, kuasa hukum keluarga tahanan meninggal.

Belum Bisa Melunasi BPIH, Ratusan CJH Jatim Terancam Gagal Berangkat

SURABAYA – Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 ini, masih banyak calon jamaah haji (CJH) asal Jawa Timur (Jatim) yang belum melunasi biaya haji, Namun Kementerian agama memberikan perpanjangan waktu hingga Jumat (12/5/2023) mendatang. Meski demikian, jika belum bisa melunasi maka tidak bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini dan ditunda hingga tahun depan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat keputusan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tidak hanya untuk jamaah namun juga para petugas haji daerah serta pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah

Adapun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) termahal dibebankan kepada jemaah yang berangkat dari Embarkasi Surabaya dengan biaya Rp55.928.458,26. Sementara untuk biaya haji termurah berasal dari Embarkasi Aceh sebesar Rp44.364.357.

Di antara CJH yang belum bisa melunasi biaya adalah ratusan CJH dari Kabupaten Blitar. Dikutip dari beritajatim.com, Selasa (9/5/2023), berdasarkan data Kemenag Kabupaten Blitar, total ada 139 calon jamaah haji yang belum melakukan pelunasan BPIH. Mereka yang belum melakukan pelunasan ini ada beberapa alasan mulai dari belum terkumpulnya biaya, menunda, hingga meringgal dunia.

"Total ada 804 calon jamaah haji yang telah melakukan pelunasan biaya haji," kata Kasi Pelaksanaan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Hamim Thohari, Selasa (9/5/2023).

Hamim menjelaskan 804 calon jemaah haji melakukan BPIH sebelum 5 Mei 2023 lalu. Lantaran masih ada CJH yang belum melakukan pelunasan, maka masa pelunasan diperpanjang. "Masih ada kesempatan untuk melunasi biaya haji hingga tanggal 12 Mei 2023 mendatang," imbuhnya.

Jika sampai batas waktu yang ditetapkan ada CJH belum juga melakukan pelunasan BPIH, maka secara otomatis gagal berangkat haji tahun ini. Hamim mengaku data akhir pelunasan biaya haji tersebut akan dikirim ke Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lamongan Jatim mencatat bahwa saat ini masih tersisa sebanyak 179 Calon Jamaah Haji (CJH) yang belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Sedangkan yang sudah melunasi BPIH dalam catatan Kemenag mencapai 1.530 CJH.

"Ada kebijakan dari Kementerian Agama. Semoga perpanjangan waktu pelunasan itu bisa memberikan kesempatan bagi CJH untuk melunasinya," kata Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Lamongan, Abdul Ghofur dikutip dari Surya, Selasa (9/5/2023).

Dia menandakan bahwa



(Ilustrasi) pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 ini, masih banyak calon jamaah haji (CJH) asal Jawa Timur (Jatim) yang belum melunasi biaya haji

perpanjangan waktu sampai Jumat (12/5/2023) sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini Kemenag pada CJH. Ghofur berpesan kepada CJH agar tidak menunda pelunasan BPIH.

Jika sampai hari akhir pelunasan masih ada CJH yang belum bisa melunasi, maka kesempatan berhaji akan diberikan kepada para CJH cadangan sesuai dengan nomor urut. "Untuk sementara tercatat masih ada 179 CJH yang belum melunasi. Soal penyebabnya Kemenag juga menunggu konfirmasi," tambah Ghofur.

Kemenag Lamongan tetap menunggu kepastian dari para CJH hingga batas akhir waktu yang sudah ditentukan hingga 3 hari mendatang. Bagi CJH yang belum dapat melunasi BPIH akan dipastikan gagal berangkat menjalankan ibadah haji tahun 2023. Namun mereka mendapat kesempatan pada tahun berikutnya karena porsinya tidak hangus.

Ditanya proses perekaman biometrik untuk proses visa bio, Ghofur menyatakan sudah sepenuhnya berjalan lancar. "Sebetulnya terkait bio visa ini menjadi kewajiban jamaah sendiri, tetapi ada kesulitan di lapangan sehingga kita mendampingi," ungkapnya.

Sehingga Kemenag membantu perekaman biometrik secara kolektif bagi CJH yang belum bisa melakukan secara mandiri. Proses perekaman 1.770 CJH ditargetkan tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah lalu. "Kita kerja ekstra terkait perekaman biometrik tuntas tanpa ada kendala," urai Ghofur.

Visa bio menjadi salah satu syarat administrasi untuk pengurusan paspor CJH Selain memuat identitas, hasil perekaman biometrik dari kedua

dokumen resmi itu akan dicocokkan sebagai tiket perjalanan ke tanah suci atau haromain.

Menurutnya, sudah banyak CJH yang mengikuti rekam medis. Skrining di puskesmas dimaksudkan untuk memudahkan CJH sebagai dasar untuk penetapan CJH kriteria istithaah (berkemampuan) dari sisi kesehatan. Juga untuk mengklasifikasi kelompok resiko tinggi berdasarkan penyakit komorbid maupun lanjut usia (lansia).

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, Ashabul Yamin mengatakan bahwa sampai batas akhir 5 Mei 2023, baru ada 90 persen CJH yang sudah lunas BPIH dan terdapat 10 persen CJH yang belum lunas.

"Dari 1.158 kuota jemaah yang didapatkan oleh Kabupaten Tuban, baru ada 1.037 yang sudah lunas," ujar Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenag Tuban, Ashabul Yamin dikutip dari bloktuban.

Sebanyak 10 persen CJH yang belum melakukan pelunasan tersebut terdiri dari total 121 CJH, dengan rincian sebanyak 104 jamaah reguler dan lansia, dan jamaah cadangan yang belum melunasi sebanyak 17 orang. Sedangkan dari 1.037 CJH yang sudah lunas mereka diantaranya 947 jamaah reguler dan lansia, dan 90 jamaah cadangan.

Dan kabar bagusya untuk 10 persen CJH yang belum melunasi BPIH ini masih ada waktu hingga hingga 12 Mei 2023 pukul 15.00 WIB. "Ada perpanjangan waktu pelunasan hingga tanggal 12 mas, hal tersebut tertuang pada SK Dirjen PHU Nomor 181 Tahun 2023," imbuhnya.

Lebih lanjut, setelah jadwal

pelunasan biaya haji ini berakhir, nantinya akan ada jadwal kegiatan penyusunan kloter pemberangkatan CJH serta manasik haji. "Jadwal selanjutnya adalah Praman, penyusunan kloter jemaah," sambungnya.

Sebagai informasi tambahan, dari 38 Kabupaten dan kota di Jawa Timur, Kabupaten Tuban menjadi salah satu kabupaten/kota yang persentase pelunasan sudah mencapai 90 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur yang persentase pelunasannya sudah mencapai 90 persen diantaranya Mojokerto, Madiun dan Magetan.

Di satu sisi, Kanwil Kemenag Jatim mencatat per 3 Mei 2023 setidaknya masih ada 24 persen CJH Jatim yang belum menyelesaikan kewajibannya bayar BPIH. Sebagian di antaranya memutuskan untuk mengundurkan diri.

Berdasar data Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim, kuota CJH di Jawa Timur tahun ini mencapai 35.152 jamaah. Sejak tahap pelunasan dibuka pada 11 April lalu, 76 persen CJH asal Jatim sudah melakukan pelunasan.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Jatim Abdul Haris menjelaskan, ada beberapa penyebab yang membuat CJH belum melakukan pelunasan. Pertama, soal pelimpahan pemberangkatan. CJH yang seharusnya berangkat berhalangan sehingga digantikan oleh anak maupun keluarga.

Kedua, kepastian pendamping yang membuat mereka ragu. Terakhir, ada juga yang masih bingung soal besaran biaya pelunasan. Akhirnya, bisa jadi menunda keberangkatannya. "Tapi, yang terbanyak soal proses pelimpahan," paparnya dikutip dari Jawa Pos. (lut/dya)



ONADIO LEONARDO

Profil Bintang Film Hello Ghost



dengan Onad selama di lokasi syuting.

"Dia merasa syuting akan fun karena teman-teman dia, sorry kami menjauhi dia. Aku cukup tegas juga, 'Nad kalau kita serius kita bisa kok,'" tutur Enzy Storia.

Adapun film Hello Ghost tak hanya dibintangi Onadio Leonardo dan Enzy Storia, tetapi ada pula Indro Warkop, Hesti Purwadinata, dan Tora Sudiro.

Film Hello Ghost bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 11 Mei 2023.

Profil

Onadio Leonardo adalah musisi dan aktor kelahiran Jakarta pada 1990 silam.

Onadio Leonardo adalah vokalis grup band Killing Me Inside sampai 2014. Lalu, pada 2019 ia menjadi vokalis dari grup band LYON.

Kini, ia telah menjadi aktor pendatang baru dalam dunia seni peran Indonesia. Beberapa film layar lebar telah Onadio Leonardo bintang.

Sebelum debut layar lebar di film Pretty Boys 2019, Onad pernah bermain di sinetron Jin dan Jun pada 2000.

Sejak bermain di layar lebar, Onad terus bermain film sampai sekarang. Beberapa sinema terbarunya yang akan rilis adalah Keluarga Slamet dan Hello Ghost.

Slamet dan Hello Ghost.

Kiprahnya dalam dunia musik juga tidak main-main. Mantan vokalis band Killing Me Inside ini masih eksis sebagai vokalis dalam band LYON.

LYON memiliki anggota Okin, Onad dan Rudy. Namun sayang, grup musik ini sedang vakum sejak 2021 lantaran terdapat berita yang kurang me-nge-nakan bagi para fansnya. (berbagai Sumber)

PROFIL

Nama: Leonardo Arya
TTL: Jakarta, 4 Januari 1990
Umur: 33 Tahun (2023)
Pekerjaan: Musisi, aktor, pembawa acara, podcaster

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Film: | Serial Web: |
| - Pretty Boys 2019 | - Pergi Pagi Pulang Untung |
| - Agen Dunia 2021 | Reborn 2019 |
| - #BerhentiDiKamu 2021 | - Julid Oh Julid 2020 |
| - I Will Survive 2021 | |
| - Keluarga Slamet | Sinetron |
| - Hello Ghost | - Jin dan Jun 2000 |

Acara TV:

- Merinding 2019
- New Comedy Night Live 2019
- Gong Show Indonesia 2019
- Okay Bos 2020
- In The Kos 2020
- Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV 2021
- Tonight Show 2021 - 2022

Lagu:

- Dangkalan dan Rasakan ft Riefian 2017
- On A Day Just Like This ft. Widy Soediro 2017
- HEY ft Debora Debby Wage 2018
- Metal Slave ft Sansan, Pee Wee Gaskins, Roycdc 2019

Album Killing Me Inside:

- A Fresh Start for Something New 2009
- Killing Me Inside 2010
- One Reason 2012



AKTOR Onadio Leonardo atau akrab disapa Onad, menjadi pemeran utama dalam film Hello Ghost, adaptasi dari Korea Selatan.

Dalam film garapan Indra Gunawan itu, Onad berperan sebagai Kresna.

Namun, siapa sangka Onad sempat berpikir ingin menyerah dari proyek film Hello Ghost.

"Tadinya gue sudah mau keluar dari film ini," ujar Onadio Leonardo di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Bukan tanpa alasan pria 33 tahun itu berpikir untuk mengundurkan diri. Pasalnya, dia merasa pemain lainnya

menjauhi dirinya selama di lokasi syuting.

"Kok gue dijauhin sama semua orang. Gue sempat baper, 'apa sih ini syuting kok enggak fun,'" ucap Onad.

Para pemain lain ternyata sengaja menjauhi ayah satu anak itu supaya bisa mendalami karakternya sebagai Kresna.

Siapa sangka, cara tersebut ternyata berhasil membuat Onad mendalami karakternya dengan baik.

"Film ini berkat kalian. Serius," kata Onad.

Di kesempatan yang sama, Enzy Storia mengakui dirinya menjaga jarak



FILM HELLO GHOST

ASAM URAT,

PENYEBAB DAN CARA MENGATASI

PENYEBAB asam urat biasanya karena apa sih? Simak artikel di bawah ini!

Kamu mungkin pernah mendengar ada saudara, orang tua atau teman yang mengalami sakit asam urat.

Selain menyerang lansia, asam urat kini banyak diderita oleh orang yang terbilang muda, yakni sekitar 30 tahunan.

Umumnya yang mengalami sakit asam urat akan mengeluh sakit atau nyeri di sekitar kaki dan lutut. Rasa sakit dan nyeri tersebut bisa jadi merupakan ciri-ciri asam urat. Lalu apakah penyakit asam urat itu? Berikut penyebab dan cara menurunkannya.

●●● PENGERTIAN ASAM URAT

Dikutip dalam buku Asam Urat yang ditulis oleh dr. Nyoman Kertia, Sp.P.D.-K.R., asam urat adalah asam yang terbentuk akibat metabolisme purin di dalam tubuh. Purin sendiri berasal dari makanan yang memiliki protein tinggi. Sedangkan penyakit asam urat adalah penyakit yang timbul akibat kadar asam urat dalam darah berlebihan. Normalnya asam urat akan dibuang lewat ginjal dan menjadi air seni.

Oleh sebab itu, ginjal dan asam urat saling bersinggungan. Kadar asam urat dalam darah yang tinggi bisa mengakibatkan penyakit ginjal, sebaliknya penyakit ginjal dapat menyebabkan asam urat tinggi.

●●● KRITERIA SESEORANG TERKENA PENYAKIT ASAM URAT

- Menyerang sendi pangkal jempol kaki
- Menyerang sendi pangkal jari-jari kaki
- Hanya menyerang satu sendi
- Menyerang sendi secara asimetris Sendi yang terserang berwarna merah
- Nyeri sendi hebat di hari pertama serangan
- Serangan akut kambuh-kambuhan Kadar asam urat darah melebihi normal
- Tidak didapatkan kuman di dalam cairan sendi
- Didapatkan tofus di sekitar sendi
- Didapatkan kristal natrium urat di dalam tofus
- Pada pemeriksaan rontgen ada gambaran lesi khas karena natrium urat

●●● PENYEBAB SAKIT ASAM URAT

Menurut penelitian di tahun 2017, prevalensi asam urat adalah 3% hingga 6% pada pria dan 1% hingga 3% pada wanita. Berikut beberapa hal yang dapat memicu asam urat tinggi.

- Lansia
- Berjenis kelamin pria
- Obesitas
- Mengonsumsi makanan tinggi zat purin
- Minuman beralkohol
- Minuman manis, soda, dan sirup jagung yang mengandung fruktosa tinggi
- Obat-obatan termasuk diuretik, aspirin dosis rendah, beberapa antibiotik yang diresepkan untuk tuberkulosis, dan siklosporin

●●● CARA MENURUNKAN KADAR ASAM URAT

Asam urat terbukti timbul akibat gaya hidup seseorang kurang baik.

Dikutip dari laman verywellhealth, satu studi menemukan bahwa diet kaya tumbuhan, seperti diet DASH, dapat menurunkan kadar asam urat dalam urin kamu.

Penelitian menunjukkan mungkin ada beberapa alasan mengapa pola makan nabati meningkatkan kemampuan tubuh kamu untuk mengeluarkan asam urat, termasuk respons insulin terhadap kadar karbohidrat yang lebih rendah.

Para ahli merekomendasikan diet sehat dan seimbang yang kaya akan sayuran, buah-buahan, Produk susu rendah lemak, Telur, dan Tahu

Itulah penjelasan singkat tentang penyakit asam urat. Jika kamu mengalami atau mengeluhkan sakit di sekitar sendi seperti penjelasan di atas segera periksakan diri kamu ke dokter (detik)



APPLE TETAP DOMINAN, CEK RAHASIANYA

APPLE tetap dominan dalam hal keuntungan meski angka pengiriman totalnya tergusur Samsung pada pasar ponsel kuartal pertama (Q1) 2023.

Apa rahasianya?

Berdasarkan riset Counterpoint, pasar smartphone global sendiri menghadapi anjaknya pasar pada kuartal pertama 2023 dengan penurunan pengiriman (shipment) sebesar 14 persen Year on Year (YoY) dan 7 persen Quarter on Quarter (QoQ) menjadi 280,2 juta unit pada Q1 2023.

Analisis Senior Harmeet Singh Walia mengatakan angka pengapalan pada kuartal pertama ini terkait menurunnya kepercayaan konsumen pada perekonomian.

"Pengiriman smartphone me-

nurun pada Q1 2023 setelah kuartal musim liburan terlemah sejak 2013, karena pemulihan yang lambat di China ditambah oleh kegagalan bank yang mengkhawatirkan di kedua sisi Atlantik yang semakin melemahkan kepercayaan konsumen dalam menghadapi volatilitas pasar yang tak henti-hentinya," ujarnya dalam keterangan resmi.

"Pasar smartphone juga terpukul oleh beberapa merek besar yang memasok lebih sedikit perangkat baru ke pasar yang sedang berjuang dengan persediaan yang tinggi di saat konsumen memilih untuk lebih jarang memperbarui ponsel, tetapi dengan smartphone yang lebih tahan lama ketika mereka membeli," lanjutnya.

Akibatnya, pendapatan smartphone global dan laba operasional juga menurun, meskipun penurunannya

tidak sebanyak angka pengapalan.

Penurunan angka pengapalan Apple sendiri lebih rendah dari Kuartal IV 2022 70 jutaan unit menjadi 58 juta unit pada Q1 2023, atau turun 2 persen.

Jumlah ini membuatnya disalip Samsung yang mengalami peningkatan pengiriman dari 58,3 juta unit di Q4 2022 menjadi 60,6 juta unit pada Q1 2023.

Meski demikian, Apple meraih hampir setengah dari semua pendapatan smartphone global.

Rinciannya, operating profit (laba operasional) Apple mencapai lebih dari 80 persen dari pasar smartphone global, atau berjarak 72 persen dari yang didapat Samsung.

Selain itu, revenue (pendapatan) mencapai 50 persen, atau ada gap 31 persen dari pesaing terdekatnya, Samsung.

Secara keseluruhan, pada periode ini, Apple dan Samsung menjadi merek yang paling untung dengan persentase 96 persen dari keuntungan operasional smartphone global.

Kenapa Apple bisa untung?

Direktur Riset Counterpoint Jeff Fieldhack mengungkap "Apple mengungguli pasar karena beberapa faktor."

Pertama, ekosistemnya yang kaku yang mencegah pelanggannya memilih smartphone yang lebih murah bahkan di saat ekonomi sulit.

Kedua, Apple menarik pengguna yang bersedia mengeluarkan lebih banyak uang untuk perangkat yang tahan lama.

Ketiga, jadi merek yang disukai konsumen Gen Z di Barat. Keempat, Apple mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Huawei di pasar premium China.

"Jadi, Apple mampu mengatasi fluktuasi ekonomi dan lainnya lebih baik daripada para pesaingnya sambil menikmati kesetiaan yang tak tergoyahkan," urai Fieldhack.

Hp China

Selain Samsung dan Apple, merek smartphone global dari China, Xiaomi, Oppo dan vivo, harus menunggu lebih lama untuk pulih kembali karena masing-masing dari mereka mengalami penurunan tahunan sebesar dua digit pada Q1 2023. Hal ini disebabkan pemulihan ekonomi China butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan.

Oppo baru-baru ini juga menghadapi tantangan di pasar luar negeri. Oppo harus keluar dari pasar Jerman setelah kalah dalam gugatan paten dengan Nokia. Pada saat yang sama, pendapatan dan profit ketiga merek tersebut juga mengalami kesulitan.

Oppo dan Vivo mengalami penurunan pengiriman tahunan dan ASP, yang menyebabkan penurunan pendapatan dua digit. Sementara itu, pertumbuhan ASP tahunan Xiaomi yang hanya sedikit tidak dapat mencegah penurunan pendapatan dua digit pada Q1 2023.

Counterpoint pun memprediksi pasar ponsel pintar secara keseluruhan juga kemungkinan akan mengalami kesulitan selama beberapa kuartal ke depan, terutama akibat inflasi tinggi, penurunan daya beli, dan keputusan OPEC memangkas produksi minyak.

"Meskipun penurunan pengiriman smartphone stabil, pemulihan yang signifikan tidak mungkin terjadi sebelum kuartal liburan akhir tahun," ujar Tarun Pathak, Direktur Riset Counterpoint (CNN) (ist)





COVID-19 BERAKHIR,

MASYARAKAT TETAP HARUS WASPADA

MESKIPUN WHO (World Health Organisation) telah mengumumkan status darurat pandemi Covid-19 telah berakhir, epidemiolog Universitas Andalas Padang Defriman Djafri mengimbau agar masyarakat tetap waspada.

"Saya katakan ke depannya ancaman itu tetap ada. Karena memang perubahan iklim, dan lain-lain, itu sangat kompleks sekali. Ancaman itu tentu akan bisa kita hadapi ketika pembelajaran yang selama 3 tahun belakangan ini memang benar-benar dipahami oleh masyarakat," kata Defri.

"Kita melihat bahwa dari evaluasi yang dilihat secara global maupun juga emergencynya mungkin sudah bisa diputuskan untuk berakhir. Tapi tentu bagaimanapun ancaman dan juga yang paling penting pembelajaran pada masa pandemi 3 tahun terakhir itu yang paling penting untuk menghadapi ancaman ke depan," imbuhnya.

Defri mengatakan bahwa meskipun status darurat pandemi Covid-19 telah resmi berakhir, masyarakat tetap harus cerdas dalam melihat informasi dan melakukan adaptasi.

Sehingga apabila ke depannya muncul ancaman baru, masyarakat pun tidak mudah panik dan bisa mengatasinya dengan baik.

Selain itu, Defri juga berharap agar epidemiolog dan seluruh bidang ilmu lain tetap bersinergi untuk menghadapi ancaman penyakit-

penyakit yang sifatnya menular di kemudian hari.

"Kalau dari dulu, pentingnya bagaimana perubahan perilaku atau adaptasi terkait dengan bagaimana kita cerdas dalam menghadapi ini, saya yakin juga tidak akan serumit ini. Pembatasan-pembatasan pun tidak akan sampai berjilid-jilid, ketika masyarakatnya dibangun cerdas beradaptasi terhadap pandemi ini," ujarnya.

"Memang kita harus cerdas melihat informasi dan melakukan adaptasi. Kemudian epidemiolog atau bidang ilmu yang lain juga perlu bersinergi dalam memahami bagaimana dinamika dan termasuk juga model transmisi terhadap ancaman penyakit-penyakit menular yang sifatnya infeksius ke depan," tambahnya

Tak hanya itu, Defriman juga mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker di tempat-tempat tertentu. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap terlindungi kesehatannya.

"Masker yang digunakan itu kan sebenarnya upaya pencegahan agar memang secara dini atau personal equipment yang bisa melindungi kita, mencegah terjadinya transmisi. Nah transmisi yang dilihat adalah penularan dari orang ke orang melalui droplet ini," terang Defri.

"Kalau dengan model penyakit dan

infeksi dengan jalur penularan yang sama, tentu masker akan lebih efektif dalam mencegah itu. Pertanyaannya adalah ancaman ke depan apakah penularannya juga melalui droplet? Jadi saran saya, apakah penting atau tidak, ya makanya harus cerdas," lanjutnya.

Terakhir, Defri mengatakan bahwa masyarakat perlu mengingat bahwa semakin banyak berinteraksi maka mutasi virus akan mungkin terjadi.

Sehingga, tidak ada salahnya apabila masyarakat tetap menjaga diri meskipun status darurat Covid-19 telah berakhir.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengemukakan pemerintah sedang menyusun strategi transisi untuk mengakhiri status kedaruratan kesehatan akibat Covid-19 di dalam negeri.

Syahril mengatakan Kemenkes telah berkonsultasi dengan Dirjen WHO dan Tim WHO di Jenewa dan Indonesia untuk mempersiapkan transisi pandemi.

Kendati status kegawatdaruratan pandemi sudah dicabut, kata Syahril, pemerintah tetap mengedepankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. WHO juga menegaskan perlunya strategi transisi untuk penanganan Covid-19 jangka panjang.

Strategi jangka panjang yang dimaksud di antaranya dengan

surveilans kesehatan di masyarakat, dan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan, serta mempersiapkan kebijakan kesehatan lainnya, sebagai upaya ketahanan kesehatan nasional dan kesiapsiagaan atas kemungkinan adanya pandemi di masayakangan datang.

Masyarakat juga diimbau agar tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan. Upaya vaksinasi juga terus dijalankan terutama untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling berisiko, kata Syahril. (Ant)



Saat Keterwakilan ... (dari hal 1)

PROTES keras terkait Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengenai keterwakilan perempuan mencuat ke permukaan. Bawaslu pun berjanji segera membentuk forum tripartit bersama KPU dan DKPP. Forum itu akan membahas

"Dalam konteks ini kalau membaca, melihat, mengikuti, memang KPU sudah melakukan berbagai proses mulai RDPU lalu kemudian konsinyering, harmonisasi," ujar Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

"Jika memang ada situasi khusus seperti ini tentu bagi kita kan harus lihat lagi, 'oh dia bertentangan dengan UU', maka perlu dilakukan pertimbangan ulang, dilakukan revisi ulang, lakukan simulasi ulang. Ini jadi penting. Tapi tentu saja tanpa mengabaikan proses yang telah berjalan di KPU," sambungnya.

Pertemuan tripartit itu dijadwalkan hari ini Selasa (9/5/2023). Lolly mengatakan Bawaslu bersama KPU dan DKPP akan berdiskusi mencari solusi terbaik terkait aturan tersebut. "Kita cari dulu duduk sama-sama dengan KPU dengan DKPP supaya sama-sama ada solusi cepat, tanpa kemudian menganulir soal afirmative action tapi juga tanpa mengganggu tahapan," katanya.

Lolly mengatakan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 akan menjadi masalah jika bertentangan dengan UU Pemilu. Dia mengatakan Bawaslu akan menampung terlebih dulu aspirasi dari keterwakilan perempuan yang menolak PKPU tersebut. "Kita hormati juga proses itu (PKPU sudah melalui RDP) kan. Nah sikap Bawaslu adalah kalau ada yang terlewat dalam konteks ini, UU yang jadi payung di atasnya, mari kita lihat kembali," tuturnya.

Sebagai informasi, Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dinilai bisa membuat keterwakilan perempuan di legislatif menjadi kurang dari 30%. Pasal ini mengatur keterwakilan perempuan di bawah dalam teknis penghitungan proporsi jumlah keterwakilan perempuan di satu dapil.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan hal itu dapat 'mengeliminasi' ribuan politisi perempuan yang hendak mencalonkan diri.

Perludem bersama lembaga lainnya, yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, pun mendesak KPU merevisi aturan yang dianggap sebagai "sebuah kemunduran" dan "bertentangan dengan Undang-Undang" tersebut.

Dijelaskannya, pada pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memberlakukan pembulatan ke bawah apabila perhitungan 30% keterwakilan perempuan dari total bakal caleg yang dibutuhkan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima.

Sebagai contoh, apabila di suatu daerah pemilihan dibutuhkan delapan

bakal caleg, maka 30% keterwakilan perempuan semestinya adalah 2,4 orang. Namun karena angka desimalnya kurang dari koma lima, maka di dapil tersebut ada dua bakal caleg perempuan untuk memenuhi syarat.

Ini berbeda dengan peraturan KPU sebelumnya, di mana berlaku pembulatan ke atas sehingga dalam kasus tadi, keterwakilan perempuan semestinya bisa menjadi minimal tiga orang. "Kalau pembulatan ke bawah, yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak politik perempuan. Undang-Undang kan menyebutnya 'paling sedikit' 30 persen, kalau lebih ya lebih bagus. Ini berdampak pada hilangnya hak politik perempuan," kata mantan komisioner KPU, Ida Budhiati dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Titi Anggraini dari Perludem pun mempertanyakan asal muasal ayat yang memberlakukan pembulatan ke bawah ini. Sebab, di dalam draf PKPU yang disajikan saat uji publik, ketentuan soal pembulatan masih berlaku ke atas seperti sebelum-sebelumnya.

Namun substansi yang tercantum dalam aturan yang disahkan berbunyi sebaliknya. Belum jelas bagaimana akhirnya klausul tersebut muncul, pada saat UU Pemilu yang menjadi cantolannya tidak berubah sama sekali. "Ini jadi pertanyaan, siapa yang kemudian mengubah pendirian KPU tersebut?" kata Titi kepada BBC News Indonesia.

Jang jelas, kata Titi, KPU sempat menyatakan bahwa PKPU itu sudah merupakan hasil diskusi dan konsultasi dengan DPR. "Tapi terlepas dari siapa yang memengaruhi KPU, ketika KPU tunduk, mengikuti dan mengubah regulasinya, berarti KPU secara sadar menegaskan konsep keterwakilan perempuan di dalam pasal 245 UU Pemilu dan memilih jalan untuk mendistorsi itu," sambungnya.

Dihubungi terpisah, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan ketentuan soal pembulatan ke bawah itu muncul karena "memang yang namanya perkalian persentasasi semuanya kan harus dibulatkan".

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh aliansi ini, pembulatan desimal ini ternyata berpotensi memengaruhi ribuan politisi perempuan yang hendak mencalonkan diri.

Ketentuan itu akan membuat keterwakilan perempuan pada daerah pemilihan dengan jumlah caleg empat, tujuh, delapan, dan 11 menjadi kurang dari 30%. Pada daerah dengan empat caleg, misalnya, hanya diwajibkan satu caleg perempuan untuk bisa memenuhi syarat. Padahal satu dari empat caleg berarti keterwakilan perempuan hanya mencapai 25%.

Ketika disimulasikan dengan kursi DPR, Titi mengatakan ada 38 dari total 84 daerah pemilihan yang keterwakilan perempuannya menjadi kurang dari 30%. "Itu hanya di DPR RI, dan hanya dari satu partai. Bayangkan kalau dikalikan 18 partai politik peserta pemilu, berapa banyak hak politik perempuan yang akan tercederai dan tereliminasi oleh ketentuan ini?"

"Perempuan yang seharusnya bisa

berkompetisi pada 2024 lalu tidak mendapatkan tiket itu, karena keterwakilan perempuan didistorsi dan dieliminasi oleh ketentuan itu," kata Titi. "Itu belum termasuk di DPRD provinsi yang dapilnya ratusan, DPRD kabupaten/kota itu dapilnya ribuan, bisa dikalikan dengan jumlah partai politik kita, berapa ribu perempuan politik yang akan terdampak oleh kebijakan yang dibuat oleh KPU ini?" sambungnya.

DPR Bantah Langgar UU

Terpisah Komisi II DPR membantah regulasi keterwakilan perempuan 30 persen yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 menyalahi aturan. Hanya mekanisme pembulatan penghitungan yang diperbaiki. "Tidak ada yang melanggar undang-undang. Kami tidak mungkin berani melanggar undang-undang bulat-bulat seperti itu. Jadi kami membulatkan sesuai rumus matematika jadi bukan dari perhitungan matematika kepentingan," ujar Anggota Komisi II DPR Rifqiyuzamir Karsayuda, Selasa (9/5/2023).

Selama ini, kata dia, aturan selalu mengikuti pembulatan ke atas seperti yang diinginkan organisasi non-pemerintah (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan, aturan yang sekarang pembulatan dilakukan berdasar perhitungan matematika murni.

"Jadi kalau dari hitungan matematika kalau dia di atas lima maka bisa dibulatkan ke atas tapi kalau dia misalnya 2,1 misalnya itu maunya menjadi menjadi tiga. Selama ini kita pakai tafsir pembulatan ke atas. Nah sekarang kita luruskan," jelas dia.

Sementara itu juru bicara PKS Ahmad Mabruki mengatakan ke-

terwakilan perempuan dalam berpolitik menjadi perhatian serius. Sehingga, amanah undang-undang yang memerintahkan keterwakilan perempuan 30 persen menjadi target yang harus diperjuangkan secara serius.

"Kami melihat keterwakilan perempuan yang sudah diamanahkan UU itu penting maka kami fokus untuk bisa memenuhi persentase itu bahkan harus lebih," ujarnya.

Untuk diketahui, upaya memperjuangkan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan dimulai sejak awal era Reformasi.

Menurut catatan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, aspirasi itu muncul setelah hasil Pemilu 1999—yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia usai Reformasi—perempuan hanya berhasil menduduki 9% kursi di DPR.

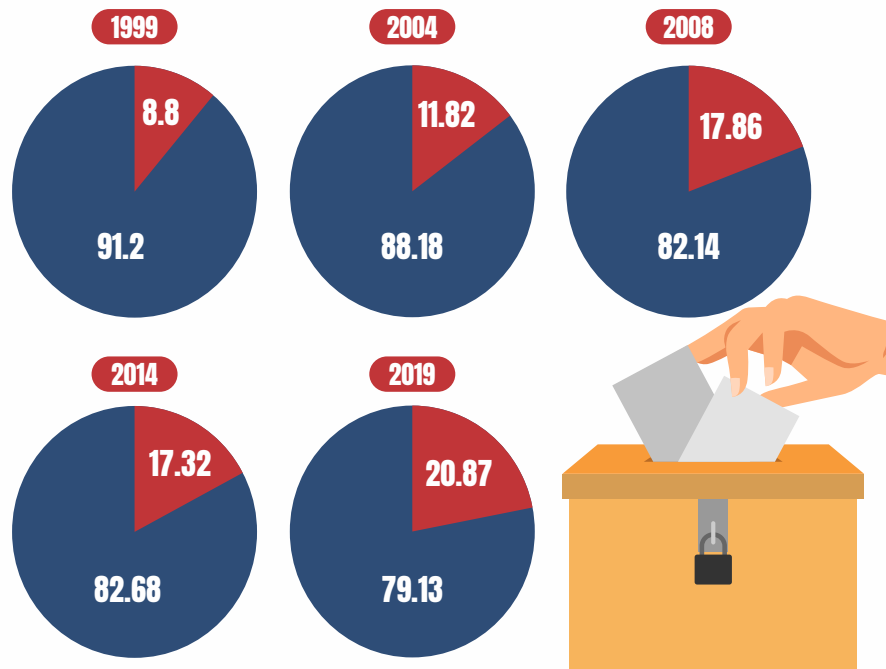
Padahal pada pemilu-pemilu sebelumnya di era Orde Baru, jumlahnya tidak pernah kurang dari dua digit. Afirmasi itu untuk pertama kalinya diteguhkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif.

Persentase keterwakilan caleg perempuan pun terus meningkat sejak saat itu, yakni 29% pada 2004, 33,6% pada 2009, 37,6% pada 2014, lalu 40% pada 2019.

Meski demikian, jumlah caleg perempuan yang berhasil menduduki kursi di parlemen belum pernah mencapai 30%. Pada 2004, jumlahnya hanya 11,8%, lalu 18% pada 2009, 17% pada 2014, dan 20% pada 2019. Padahal, jumlah pemilih perempuan sejak Pemilu 2004 tidak pernah kurang dari 49%. (wid,rls,ist,bbc/dya)

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR DALAM ANGKA

■ Laki-Laki ■ Perempuan



Ada 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki Luhut Kejar Pakai Azas Simplicity Ala Tentara

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak. Untuk menagihnya, dia mengusulkan sara sederhana namun efektif ini, yang didapatkannya dari pengalamannya sebagai prajurit TNI.

"Jadi di tentara itu ada azas simplicity dalam melakukan serangan. Itu saya pegang. Karena saya tentara," kata dia di The Westin Jakarta, Selasa (9/5/2023). Cara itu dapat dilakukan, asalkan tak ada kepentingan politiknya. "Jadi sederhana saja kita buat. Bikin rumit malah kita sendiri yang jadi rumit. Sepanjang enggak ada kepentingan politik," lanjutnya.

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut. "Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Untuk diketahui, terkait lahan sawit yang belum dipajaki itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. "Kelapa sawit

itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya.

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. "Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. "Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Respon Pengusaha Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak sehingga tak masuk dalam temuan pemerintah. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. Sebab, bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy.

Menurutnya, perusahaan yang bukan anggota GAPKI juga seharusnya sulit untuk menghindari pajak. Pasalnya, itu menjadi syarat untuk bisa



(Ilustrasi) Pemerintah menemukan data banyak lahan sawit yang belum membayar pajak. (dok)

mendapatkan sertifikat dalam industri perkebunan sawit.

Oleh karenanya, ia menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seharusnya bisa menjelaskan dengan rinci data yang ditemukan. Pasalnya, untuk perusahaan besar yang terdaftar di pemerintah sudah pasti taat membayar pajak.

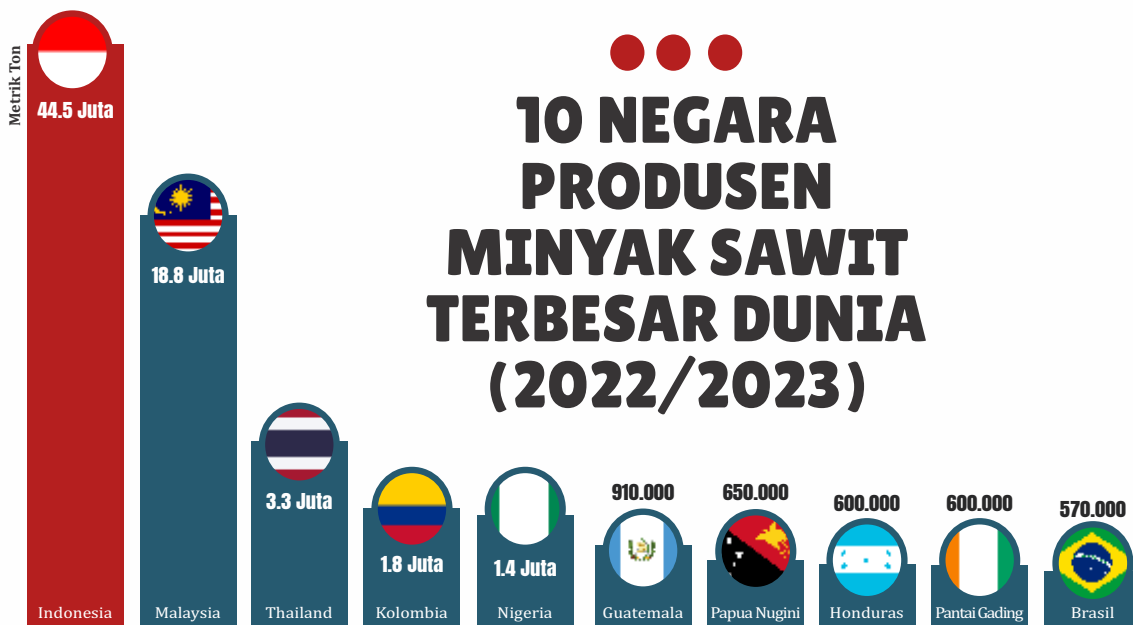
"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," jelasnya.

Diketahui dunia persawitan Indonesia mengalami berbagai perubahan aturan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan pengurangan rasio kuota hak ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mulai 1 Mei 2023. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri menyampaikan, kebijakan itu diambil dalam rangka menjaga kestabilan pasokan kebutuhan dalam negeri atau

domestic market obligation (DMO), serta memastikan harga minyak goreng di pasar rakyat tetap stabil dan terjangkau. "Kedua, menurunkan rasio pengalih dasar untuk kegiatan ekspor, yaitu dari 1:6 menjadi 1:4," kata Kasan beberapa waktu lalu.

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka rasio penjualan ke luar negeri dan pemenuhan DMO di-pangkas menjadi 1:4. Artinya, produsen hanya bisa melakukan ekspor sebanyak 4 kali dari jumlah pemenuhan pasokan dalam negeri. Sebelumnya, pemerintah memangkas rasio kuota hak ekspor CPO dari 1:8 menjadi 1:6 per 1 Januari 2023.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Firman Hidayat menuturkan, berdasarkan pengalaman pada awal tahun, eksportir memiliki hak ekspor berlebih sehingga terjadi disinsentif untuk melakukan DMO. "Kami tidak ingin ini terjadi, makanya kita perlu lakukan perubahan," ujarnya. (wid,rls,kum/dya)



PRODUKSI MINYAK SAWIT/CPO MENURUT PROVINSI 2021 (%)

